

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Panji Nagoro¹, Anissa Hakim Purwantini^{1*}, Nur Laila Yuliani¹

¹ Akuntansi / Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: anissahakimp@unimma.ac.id

ABSTRACT

Regional financial management accountability is the process of regional financial management starting from planning, implementation, accountability and supervision which must be reported to the public and interested parties to use regional financial management reports. This research aims to empirically test and analyze the influence of the quality of financial reports, internal control systems, accessibility of financial reports and regional financial accounting systems on the accountability of regional financial management. The research population was all OPDs in Magelang Regency. Based on the purposive sampling method, a sample of 26 OPDs was obtained in Magelang Regency. Hypothesis testing was carried out using multiple linear regression analysis. The results of the research show that the quality of financial reports has no effect on regional financial management accountability, the internal control system has a positive effect on regional financial management accountability, the accessibility of financial reports has no effect on regional financial management accountability and the regional financial accounting system has a positive effect on regional financial management accountability.

ABSTRAK

Kata Kunci:
internal control system; regional financial accounting system; accountability for regional financial management

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang harus dilaporkan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memakai laporan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi penelitian adalah seluruh OPD di Kabupaten Magelang. Berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 26 OPD di Kabupaten Magelang. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, tuntutan masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih bertanggungjawab dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerjanya. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan pertanggungjawaban serta mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integrasi keuangan dan ketaatan terhadap undang-undang. Akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan undang-undang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan bentuk perwujudan dari pertanggungjawaban atas pengendalian sumber daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan (Sari et al., 2020).

Menurut Mardiasmo (2009), pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya suatu akuntabilitas yang berupa keterbukaan Pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan pertanggungjawaban atas laporan keuangan karena Pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar dalam mengelola keuangan demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian laporan keuangan digunakan Pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan jasa pada publik. Namun demikian, transparansi di lingkup pemerintah daerah masih kurang optimal. Untuk mewujudkan prinsip transparansi maka Pemerintah Daerah harus memiliki aksesibilitas yang memadai guna memudahkan para *stakeholder* untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil BPKP tentang akuntabilitas kinerja, Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir mendapatkan predikat ranking CC selama dua tahun yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun berikutnya mendapatkan predikat ranking B. Meskipun demikian, berdasarkan data dari KPK Kabupaten Magelang dalam waktu lima tahun berurut-urut masih menduduki peringkat tertinggi dalam tingkat kasus korupsi Se-Kedu. Artinya menandakan bahwa akuntabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang masih tergolong rendah. Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan maka harus diketahui faktor-faktor

yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor pertama kualitas laporan keuangan, ini mengacu pada PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan harus sudah memiliki kualitas dengan karakteristik yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu: a) Relevan; b) Andal; c) Dapat Dibandingkan; d) Dapat Dipahami.

Tabel 1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Se-Kedu

Nama Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Magelang	CC	CC	B	B	B	B
Kota Magelang	B	B	B	B	B	B
Kabupaten Temanggung	BB	CC	B	B	B	B
Kabupaten Purworejo	B	B	B	B	B	B
Kabupaten Kebumen	CC	CC	B	B	B	B

Sumber: bpkp.go.id, 2023

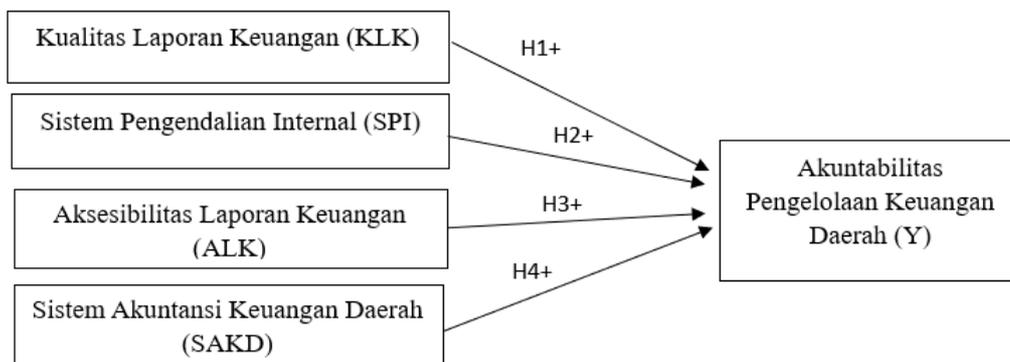
Literatur terdahulu menunjukkan bukti empiris bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Fikrian et al., 2017). Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pramita & Suhaeli, 2017). Berikutnya adalah sistem pengendalian internal (Mansyuer & Efendi, 2020). Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran penting yang berguna memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Mulyanto et,al (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian terkait determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih beragam. Sehingga perlu dilakukan riset lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Defana et al. (2023) dengan menambah variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Memaksimalkan sistem akuntansi keuangan daerah bisa terlaksana melalui pemberian informasi dan penyampaian capaian keuangan pemerintah. Keharusan sistem akuntansi keuangan daerah, yaitu perbaikan terhadap sistem pencatatan dan laporan untuk menerapkan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerah yang baik. Berkembangnya

bidang teknologi informasi bukan sekadar dipergunakan oleh organisasi bisnis, tetapi organisasi sektor publik, begitu pun dengan pemerintahan. Sesuai PP No 56 Tahun 2005 terkait Sistem Informasi Keuangan Daerah, menyebut jika menindaklanjuti penyelenggaraan pembangunan sesuai prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, pemerintah harus meningkatkan maupun mempergunakan perkembangan teknologi dan informasi, serta memberikan informasi itu ke pelayanan publik. Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan teknologi dan informasi untuk pembangunan sistem informasi manajemen dan prosedur yang memberi peluang bagi pemerintah untuk bekerja secara terpadu melalui penyederhanaan akses antar unit kerja.

Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Lane, 2002). Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Pemerintah disini menjalankan fungsi sebagai agen yang kewenangannya melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Berdasarkan konsep pada teori keagenan, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD di wilayah Kabupaten Magelang. Model penelitian dapat dilihat seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Populasi penelitian yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan (Ghozali, 2018). Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah: Kepala OPD, Kepala Bagian Keuangan, Staff Bagian Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang telah menjabat lebih dari 1 tahun.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Jawaban diperoleh dari responden atas beberapa item pertanyaan tentang penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan, audit kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang merupakan adopsi dari penelitian terdahulu. Data primer yang diperoleh menggunakan teknik kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada responden (Wahyudin, 2015). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas, dan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada *purposive sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 127 responden. Jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 105 responden atau sebesar 82,7%. Profil responden berdasarkan pendistribusian kuesioner, dapat dilihat pada Tabel 1 dengan data responden rata-rata berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia kurang dari 30 dan tingkat pendidikan minimal S1.

Tabel 1. Profil Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah Responden	Presentase
Jenis Kelamin	a. Pria	45	43%
	b. Wanita	60	57%
	Jumlah	105	100%
Usia	a. <30	41	39%
	b. 30-45	37	35%
	c. >45	27	26%
	Jumlah	105	100%
Pendidikan Terakhir	a. SMA	25	24%
	b. D3	20	19%

	c. S1	60	57%
	Jumlah	105	100%
Jabatan	1. Kepala Dinas	23	22%
	2. Kepala Subbagian Keuangan	23	22%
	3. Staf Bagian Keuangan	28	27%
	4. Bendahara Penerimaan	16	15%
	5. Bendahara Pengeluaran	15	14%
	Jumlah	105	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan CFA (*Confirmatory Factor Analysis*). Uji ini melihat nilai KMO MSA sebagai asumsi dasar untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa untuk semua variabel nilai KMO-MSA > 0,50 dengan nilai *cross loading* lebih dari 0,5 adalah valid, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. Hasil pengujian validitas pertama menunjukkan terdapat 10 pernyataan yang tidak valid, yaitu KLK5, KLK6, KLK8, KLK9, KLK10, SPI10, SPI11, APKD1, APKD14, APKD15. Kemudian dilakukan uji validitas kedua dengan menghapuskan item pernyataan yang tidak valid.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Indikator	Factor loading	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan	KLK 1	0,546	Valid
	KLK 2	0,820	Valid
	KLK 3	0,831	Valid
	KLK 4	0,800	Valid
	KLK 7	0,702	Valid
Sistem Pengendalian Internal	SPI 1	0,754	Valid
	SPI 2	0,555	Valid
	SPI 3	0,739	Valid
	SPI 4	0,695	Valid
	SPI 5	0,603	Valid
	SPI 6	0,691	Valid
	SPI 7	0,850	Valid
	SPI 8	0,587	Valid
	SPI 9	0,532	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan	ALK 1	0,597	Valid
	ALK 2	0,765	Valid
	ALK 3	0,841	Valid
	ALK 4	0,802	Valid
	ALK 5	0,831	Valid
	ALK 6	0,867	Valid

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	SAKD 1	0.938	Valid
	SAKD 2	0.936	Valid
	SAKD 3	0.921	Valid
	SAKD 4	0.854	Valid
	SAKD 5	0.918	Valid
	SAKD 6	0.908	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	APKD 2	0,723	Valid
	APKD 3	0,657	Valid
	APKD 4	0,519	Valid
	APKD 5	0,737	Valid
	APKD 6	0,503	Valid
	APKD 7	0,681	Valid
	APKD 8	0,688	Valid
	APKD 9	0,714	Valid
	APKD 10	0,735	Valid
	APKD 12	0,664	Valid
	APKD 13	0,590	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner di mana kuesioner tersebut merupakan indikator dari suatu variabel. Hasil analisis tersebut akan diperoleh melalui *Cronbach's Alpha*, variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7 (Ghozali, 2018:45). Hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
KLK	0,847	Reliabel
SPI	0,910	Reliabel
ALK	0,875	Reliabel
SAKD	0,939	Reliabel
APKD	0,930	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki *Cronbach's Alpha* > 0,70. Dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis nilai koefisien regresi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	68,962	27,963		2,466	0,015
	KLK	-0,046	0,101	-0,046	-0,452	0,652
	SPI	0,345	0,078	0,350	4,410	0,000
	ALK	0,063	0,055	0,085	1,141	0,257
	SAKD	0,475	0,092),546	5,167	0,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel 4.6 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$APKD = 68,962 - 0,046KLK + 0,345SPI + 0,063ALK + 0,475SAKD + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan dari model penelitian ini agar dapat menerangkan variasi variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

R		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0,807	0,652	0,638	20,97411

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil *Adjusted R Square* pada table 4.7, besarnya R^2 yaitu 0,638. Hal ini berarti variabel Kualitas Laporan Keuangan (KLK), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Aksesibilitas Laporan Keuangan (ALK), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mampu menjelaskan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (APKD) sebesar 63,8% sedangkan sisanya 36,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Uji statistik F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktuan (*goodness of fit*). Dalam menentukan F tabel dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1. Hasil uji F dapat dilihat dalam Tabel 6.

Tabel 6. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	82262,901	4	20565,725	46,749	0,000
Residual	43991,347	100	439,913		
Total	126254,248	104			

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,005$ dan nilai Fhitung sebesar 46,749. Berdasarkan jumlah responden ($n = 105$) dan jumlah variabel bebas ($k = 4$) maka $df1 = k = 4$, $df2 = n - k - 1 = 100$ maka dapat dilihat Ftabel sebesar 2,46. Hasil ini menunjukkan bahwa Fhitung $46,749 > Ftabel 2,46$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti model penelitian pada penelitian ini layak atau fit.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan yang digunakan pemerintah Kabupaten Magelang belum tentu bisa mencerminkan atau merepresentasikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun OPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaporkan laporan keuangan sesuai dan tepat waktu pada periode akuntansi, namun hal tersebut juga belum dapat menjadikan acuan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat mewakili akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila penyajian laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka tidak semua transaksi keuangan disajikan ke dalam laporan keuangan dengan jujur. Hal ini mengakibatkan timbulnya asimetri informasi antara pihak agen yang mana disini adalah OPD Kabupaten Magelang dan pihak principal yaitu masyarakat dan para stakeholder. Kesimpulan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Defana et.al (2023) yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Sari et. al (2023) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, artinya bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Hal ini dikarenakan pengendalian internal yang dilakukan oleh OPD Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan SOP sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang.

Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin baik dan semakin tinggi sistem pengendalian internal maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Magelang. Terwujudnya sistem pengendalian internal sudah berjalan sesuai peraturan mulai dari proses penyusunan sampai pelaporan pengelolaan keuangan, ditunjukkan dengan skor rata-rata indikator tertinggi dimiliki oleh indikator lingkungan pengendalian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mansyuer dan Efendi (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Anggara et. al (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang tidak dipengaruhi oleh aksesibilitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Magelang tidak memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang selaku agent harus dapat memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan meninformasikan segala kegiatan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat selaku *principal*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Dewi & Mildawati, 2018) yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Moniza (2021) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh negatif.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti semakin baik sistem akuntansi keuangan yang dimiliki oleh daerah dalam hal ini kelurahan maka pengelolaan keuangan daerahnya juga akan semakin akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Suatu sistem yang berkualitas dirancang untuk memudahkan kinerja kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaporan keuangan. Suatu sistem akan berkualitas bila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu sistem yang digunakan dalam pemerintah tersebut adalah sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik pemerintah, khususnya kelurahan mengelola sistem pelaporan keuangan ini maka nilai akuntabilitasnya juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Superdi (2017), Suprihastini et al., (2017), dan Angraini et al., (2016) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Mulyanto et.al (2020) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah pada OPD Kabupaten Magelang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 105 pegawai yang melaksanakan tata usaha akuntansi/keuangan pada OPD yang terdiri dari Kepala Dinas, Kasubag Keuangan, Staff Keuangan atau Akuntansi, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sementara variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas penggunaan objek penelitian tidak hanya pada OPD Kabupaten Magelang, misalnya OPD setingkat Provinsi agar dapat menggeneralisasikan hasil penelitian. Penelitian selanjutnya juga perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA